



LAMPIRAN



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 184/MENKES/PER/II/1995

TENTANG

**PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN
IZIN KERJA APOTEKER**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pendayagunaan tenaga apoteker dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan bagian dari upaya pembangunan kesehatan;
 - b. bahwa pelaksanaan masa bakti dan izin kerja apoteker yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 187/MENKES/Per/III/1991 dan peraturan lainnya, perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan kebijaksanaan pendayagunaan apoteker;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3422);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 118/MENKES/ PER/ V/76 tentang Penyesuaian Pengetahuan Sarjana Warga Negara Indonesia didikan Luar Negeri untuk melakukan pekerjaan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 207/MENKES/ PER/ V/1983 tentang Penyesuaian Pengetahuan Praktis Tenaga Apoteker Warga Negara Indonesia tamatan Luar Negeri untuk melakukan pekerjaan Apoteker di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
- b. Surat Penugasan (SP) adalah surat yang memberikan kewenangan kepada Apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
- c. Surat Izin Apotik (SIA) adalah surat izin pendirian apotik yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Masa Bakti adalah masa pengabdian profesi apoteker dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu sarana pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian.

- e. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan antara lain : sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan.
- f. Program Kesehatan adalah suatu kegiatan pembangunan kesehatan yang bersifat menyeluruh, meliputi penggunaan berbagai sumber yang terintegrasi, dilaksanakan secara berkesinambungan dengan penjadwalan waktu yang jelas guna mencapai tujuan.
- g. Visum adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang keabsahan Apoteker bekerja melaksanakan tugas keprofesiannya pada sarana kesehatan.
- h. Kanwil adalah Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi.
- i. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- j. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II PELAPORAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri dalam hal ini Biro Kepegawaian, yang berisikan daftar apoteker yang baru lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikannya ijazah asli.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tersebut pada Lampiran I peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Apoteker yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 wajib melengkapi persyaratan administrasi seperti tersebut pada Lampiran II peraturan ini yang disampaikan melalui Kanwil setempat dimana institusi pendidikan berada, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah menerima ijazah asli.
- (2) Kepada apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pelaporan seperti tersebut pada Lampiran III peraturan ini.
- (3) Kanwil meneruskan berkas pelaporan tersebut kepada Menteri, dalam hal ini Biro Kepegawaian selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah persyaratan dilengkapi.

Pasal 4

- (1) Apoteker lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melaporkan diri kepada Menteri dalam hal ini Biro Kepegawaian.
- (2) Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti penyesuaian pengetahuan praktis, yang diajukan oleh Biro Kepegawaian kepada Direktur Jenderal.
- (3) Penyesuaian pengetahuan praktis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan Penyesuaian pengetahuan praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Apoteker wajib melapor kepada Direktur Jenderal.
- (5) Direktur Jenderal memberikan Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penyesuaian Pengetahuan Praktis kepada apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seperti tersebut pada Lampiran IV peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Apoteker yang telah melengkapi persyaratan administrasi pelaporan dan telah ditetapkan untuk melaksanakan masa bakti diberi Surat Penugasan oleh Biro Kepegawaian dengan tembusan Direktorat Jenderal POM.
- (2) Surat Penugasan (SP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya.
- (3) Bentuk dan isi Surat Penugasan (SP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tersebut pada lampiran V peraturan ini.

BAB III MASA BAKTI

BAGIAN PERTAMA

Penyebaran

Pasal 6

Penyebaran apoteker diutamakan untuk memenuhi kebutuhan program kesehatan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pemenuhan kebutuhan apoteker untuk program kesehatan ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Sarana kesehatan Pemerintah
 - b. Sarana lainnya, sesuai yang ditetapkan
- (2) Pemenuhan kebutuhan apoteker pada sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a meliputi kebutuhan program kesehatan dilingkungan Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan & Kebudayaan dan HANKAM ABRI
- (3) Pemenuhan kebutuhan apoteker pada sarana kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Instansi Pemerintah selain dimaksud ayat (2);
 - b. Sarana kesehatan milik BUMN-BUMD;
 - c. Industri Pabrik obat dan kosmetik berskala kecil non PMDN-PMA;
 - d. Industri kecil obat Tradisional;
 - e. Apotik yang berlokasi di luar kotat/kodya/Ibukota Provinsi;
 - f. Rumah Sakit Swasta di luar Ibukota Propinsi;
 - g. Pendidikan Tinggi dan Menengah Swasta sebagai Staf Pengajar di bidang farmasi;

BAGIAN KEDUA

Pengajuan Kebutuhan

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab program kesehatan dan atau pimpinan instansi lain menyusun rencana kebutuhan apoteker untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
- (2) Rencana kebutuhan program kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Biro Kepegawaian melalui kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.

BAGIAN KETIGA

Pendayagunaan

Pasal 9

- (1) Pendayagunaan apoteker pada sarana kesehatan, unit organik dalam lingkungan Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan.
- (2) Pendayagunaan lebih lanjut pada sarana kesehatan atau lokasi kerja ditetapkan oleh Kanwil setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pendayagunaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan oleh Departemen yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pendayagunaan apoteker bukan pada pelayanan kesehatan oleh instansi pemerintah selain dimaksud pada pasal 9 ayat (3) menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Departemen Kesehatan.
- (2) Pendayagunaan apoteker pada sektor swasta dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan setelah mendapat pertimbangan dari Kanwil setempat sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI peraturan ini.

BAGIAN KEEMPAT

Jenis Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Apoteker yang bekerja dalam rangka pelaksanaan masa bakti di sektor Pemerintah, jenis kepegawaiannya adalah Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan kecuali apoteker sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) dan pasal 10 peraturan ini.
- (2) Apoteker yang bekerja dalam rangka pelaksanaan masa bakti di sektor swasta, berkedudukan sebagai karyawan swasta.

BAGIAN KELIMA

Pelaksanaan Masa Bakti

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan masa bakti ditetapkan menurut pembagian wilayah penempatan, yaitu:
 - a. 3 (tiga) tahun bagi yang ditempatkan di Pulau Jawa atau Ibukota Provinsi di luar Pulau Jawa
 - b. 2 (dua) tahun bagi yang ditempatkan di luar Jawa selain Ibukota Provinsi
- (2) Apoteker yang wajib melaksanakan masa bakti adalah:
 - a. Apoteker yang belum melaksanakan masa bakti
 - b. Apoteker lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah selesai melaksanakan penyesuaian pengetahuan praktis
- (3) Selama masa bakti, Kanwil dapat mengadakan mutasi apoteker di dalam Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Mutasi apoteker antar Provinsi dilaksanakan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAGIAN KEENAM

Pengembangan Karir

Pasal 13

- (1) Setelah menyelesaikan masa bakti, apoteker PNS dapat mengembangkan karirnya pada jabatan struktural, jabatan fungsional atau melanjutkan pendidikan atau bekerja pada sarana kesehatan swasta.
- (2) Bagi apoteker yang telah menyelesaikan masa bakti pada sarana kesehatan swasta, dapat mengembangkan kariernya pada sarana kesehatan lainnya.
- (3) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan fungsional apoteker harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk jabatan fungsional yang dimaksud.
- (4) Untuk dapat melanjutkan pendidikan, apoteker harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (5) Apoteker yang telah menyelesaikan masa bakti diberikan Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Masa Bakti seperti tersebut pada lampiran VII peraturan ini.

BAB IV

IZIN KERJA

Pasal 14

- (1) Apoteker yang bekerja pada sarana kesehatan milik swasta wajib memiliki Izin kerja.
- (2) Bentuk izin kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. Surat Izin Apotik (SLA) bagi Apoteker Pengelola apotik.
 - b. Visum bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Apoteker Pendamping atau Apoteker pengganti baik selama maupun setelah selesai masa bakti.
 - c. Visum bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada sarana kesehatan swasta setelah selesai melaksanakan masa bakti.
- (3) Bentuk Visum adalah seperti tersebut pada lampiran VIII peraturan ini.
- (4) Bagi apoteker yang bekerja pada sarana kesehatan swasta di dalam rangka pelaksanaan masa bakti tidak diperlukan Visum.

Pasal 15

Untuk memperoleh Surat Izin Apotik (SLA) sebagaimana, dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a, apoteker harus memiliki Surat Penugasan dan persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Visum bagi apoteker sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf b dan c diberikan oleh kanwil atas permohonan apoteker yang bersangkutan dan diketahui oleh Apoteker Pengelola Apotik atau Pimpinan sarana kesehatan dimana yang bersangkutan bekerja.
- (2) Permohonan untuk visum harus melampirkan :
 - a. Pernyataan kesediaan apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian pada sarana kesehatan tersebut;
 - b. Surat Penugasan (SP);

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Apoteker selama menjalankan tugas profesinya wajib menaati semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Apoteker selama menjalankan tugas profesinya wajib meningkatkan pengetahuan profesionalnya.

Pasal 18

- (1) Apoteker dilarang :
 - a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik apoteker;
 - b. Menjalankan profesinya di luar tempat yang tercantum dalam Visum atau Surat Izin Apotik (SIA);
 - c. Menjalankan profesinya dalam keadaan jasmani dan rohani yang terganggu;
 - d. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi apoteker.
- (2) Apoteker yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diberi peringatan dan atau pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA).

Pasal 19

- (1) Kanwil dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap apoteker yang bekerja di wilayah kerjanya mengikutsertakan organisasi profesi yang bersangkutan melalui pertemuan periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kanwil atau organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada apoteker yang melakukan pelanggaran.
- (3) Apoteker yang telah tiga kali diberi peringatan dan tidak menunjukkan adanya perbaikan, maka organisasi profesi dapat mengajukan usul pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA) kepada Kanwil.
- (4) Usul pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas disertai dengan berita acara pemeriksaan.
- (5) Setelah diberikan tiga kali peringatan, maka Kanwil setempat dapat melak-

sanakan pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA).

Pasal 20

- 1) Sebelum keputusan pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA) ditetapkan maka Kanwil terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan dari majelis yang menangani disiplin Tenaga Kesehatan.
- 2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kanwil dilampiri dengan berita acara pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Surat keputusan pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA) disampaikan kepada apoteker yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 20.
- (2) Dalam surat keputusan disebutkan lamanya jangka waktu pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA).
- (3) Apabila keputusan dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan pada Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima.

Pasal 22

- (1) Kanwil melaporkan setiap pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA) kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berita acara pemeriksaan.

BAB VI SANKSI

Pasal 23

- 1) Terhadap apoteker yang dijatuhi sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Untuk pelanggaran ringan, pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA)

- selama-lamanya 3 (tiga) bulan;
- b. Untuk pelanggaran sedang, pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA) selama-lamanya 6 (enam) bulan;
 - c. Untuk pelanggaran berat, pencabutan Visum atau Surat Izin Apotik (SIA) selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan atas motif serta situasi setempat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya peraturan ini, apoteker yang telah mendapat surat keputusan pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana (WKS) tetap berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana dan dianggap sebagai pelaksanaan masa bakti.

Pasal 25

- (1) Surat Izin Kerja Sementara (SIKS) dan Surat Izin Kerja (SIK) yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 dinyatakan masih tetap berlaku sebagai Surat Penugasan (SP)
- (2) Apoteker yang telah mendapat Surat Izin Kerja (SIK) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 187/Menkes/Per/III/1991 dinyatakan tetap berlaku dan dianggap sebagai telah memperoleh Visum.
- (3) Surat Izin Kerja (SIK) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik adalah sama dengan surat Penugasan (SP).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 187/MENKES Per/III/1991 tentang Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin kerja

Apoteker dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 89/Menkes/Per/I/1993 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 187/MENKES Per/III/1991 tentang Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

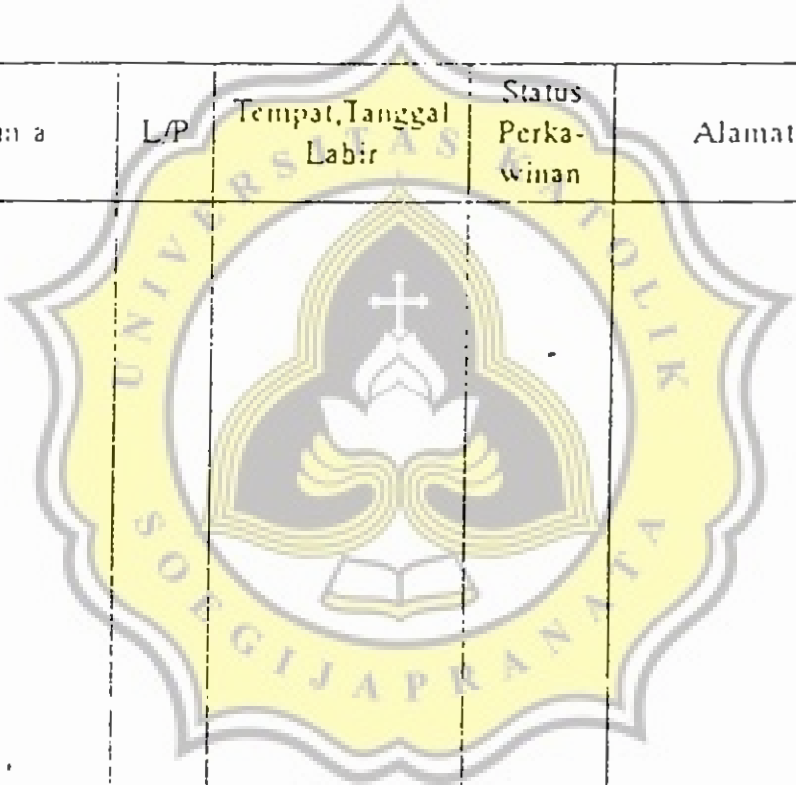


Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor : 184/MENKES/PER/II/1995

Tanggal : 17 Pebruari 1995

DAFTAR NAMA APOTEKER
LULUSAN
PERIODE TAHUN

No	N a m a	L/P	Tempat, Tanggal Lahir	Status Perka- winan	Alamat	Ket
						

Dekan Fakultas Farmasi,
Pimpinan Institusi Pendidikan Farmasi

*) TEMBUSAN

Kepala Kantor Wilayah
Depkes Propinsi

.....

Lampiran II Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 184/MENKES/PER/II/1995
Tanggal : 17 Pebruari 1995

**KELENGKAPAN PERSYARATAN PELAPORAN APOTEKER
UNTUK MENDAPATKAN SURAT PENUGASAN DAN
MENJALANKAN MASA BAKTI**

A. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

1. Surat permohonan/pelamaran pekerjaan dengan menyebutkan 3 (tiga) Provinsi pilihan.
2. Daftar riwayat hidup.
3. Surat pernyataan tidak pernah dihukum.
4. Surat pernyataan tidak pernah terlibat gerakan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
5. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat.
6. Surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil.
7. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI
8. Surat pernyataan tidak berpartai politik.
9. Salinan/foto copy ijazah yang telah disahkan oleh Dekan Institut Pendidikan Farmasi.

Bagi lulusan Perguruan Tinggi Swasta diperlukan pula pengesahan dari Kopertis Wilayah setempat.

10. Surat Keterangan berkelakuan baik dari POLRI
11. Surat keterangan dari Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat (AK-I).
12. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
13. Surat keterangan tidak buta warna dari dokter pemerintah.
14. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar
4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
15. Hasil penelitian khusus (Litsus).

16. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengakuan ijazah apoteker yang bersangkutan, sederajat dengan ijazah perguruan tinggi di Indonesia (bagi lulusan luar negeri).

B. ANGGOTA ABRI.

1. Salinan/copy ijazah yang telah dilegalisir oleh Dekan Fakultas Farmasi/Pimpinan institusi pendidikan farmasi (bagi lulusan Universitas Negeri) atau oleh Kopertis Wilayah setempat (bagi lulusan Universitas Swasta dengan status disamakan).
2. Daftar riwayat hidup.
3. Surat keputusan pengangkatan sebagai anggota ABRI
4. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

C. KARYAWAN SWASTA.

1. Surat permohonan/pelamaran pekerjaan.
2. Daftar riwayat hidup.
3. Salinan/copy ijazah yang telah dilegalisir oleh Dekan Fakultas Farmasi/Pimpinan institusi pendidikan farmasi (bagi lulusan Universitas Negeri) atau oleh Kopertis Wilayah setempat (bagi lulusan Universitas Swasta dengan status disamakan).
4. Surat keterangan berkelakuan baik dari POLRI.
5. Surat keterangan dari Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat (AK-1).
6. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
7. Surat keterangan tidak buta warna dari dokter pemerintah
8. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Keterangan :

- Masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) kecuali pas foto.
- Ditulis dengan huruf cetak/balok tinta hitam/vulpen.
- Nama, tanggal lahir harus sama dengan nama dan tanggal lahir pada ijazah.

Lampiran III Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor : 184/MENKES/PER/II/1995

Tanggal : 17 Pebruari 1995

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT BUKTI LAPOR
NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen
Kesehatan Propinsi menerangkan bahwa :

N a m a
Alamat rumah

Lulusan :
tanggal

Telah melaporkan diri di kantor kami pada tanggal

Kepala Kantor Wilayah DEPKES
Propinsi

.....
NIP

Lampiran IV Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor : 184/MENKES/PER/II/1995

Tanggal : 17 Pebruari 1995

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini, Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan menerangkan bahwa :

N a m a :
Lulusan :
tanggal :
Alamat :

Telah selesai menjalankan penyesuaian pengetahuan praktis pada Departemen Kesehatan RI.

Jakarta,

Direktur Jenderal
Pengawasan Obat dan Makanan DEPKES

.....
NIP

TEMBUSAN kepada Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes.

Lampiran V Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor : 184 MENKES/PER/II/1995

Tanggal : 17 Pebruari 1995

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENUGASAN

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor MENKES/PER/...../19..... kepada :

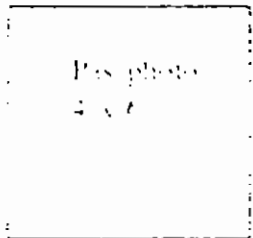
Nama
Umur dan tanggal lahir
Pendidikan
Mulai tanggal

Diberikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai Apoteker.

Dikeluarkan di JAKARTA

Pada tanggal

Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal DEPKES



DISBUKAN kepada Yth,
Direktori Jenderal POM

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 184/MENKES/PER/II/1995
TANGGAL : 17 Februari 1995

Perihal: Permohonan pengangkatan
dan penempatan Apoteker
di sektor Swasta/BUMN

Yang Terhormat,
Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Di : JAKARTA

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3422) dan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor/MENKES/PER/...../19.....dengan ini:

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Pendidikan :

tanggal

.....dipertimbangkan untuk melaksanakan masa bakti sebagai apoteker
pada

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui mengingat sarana/lokasi yang
dimohon memenuhi persyaratan sebagai tempat pelaksanaan masa bakti

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian dan terima kasih atas perhatiannya.

.....
Kepala Kantor Wilayah DEPKES

Propinsi
.....

.....
NIP.....
.....



Lampiran VII Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 184/MENKES/PER/II 1995
Tanggal : 17 Pebruari 1995

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KETERANGAN SELESAI MASA BAKTI
NOMOR :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor/MENKES/PER/...../19..... dengan ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Lulusan :
tanggal
Pangkat/jabatan :

Dinyatakan telah selesai masa bakti sebagai

APOTEKER

Dan kepada yang bersangkutan diucapkan terima kasih, serta penghargaan atas jasa-jasanya selama melaksanakan Masa Bakti.

Dikeluarkan Di : J A K A R T A

Pada tanggal :

Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal DEPKES

TEMBUSAN kepada Yth. :

Direktur Jenderal Pengawasan Obat
dan Makanan Departemen Kesehatan

Lampiran VIII Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor : 184 MENKES/PER-II/1995

Tanggal : 17 Februari 1995

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI
PROPINSI

VISUM APOTEKER

Nomor :

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan RI Propinsi

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tanggal 17 September 1992 tentang Kesehatan .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 Tanggal 23 Agustus 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : Tanggal tentang Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker.

memberi Visum Apoteker kepada :

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Pemegang Ijazah :

Nomor dan Tanggal Ijazah :

Nomor dan Tanggal SIK SP :

Untuk melakukan pekerjaan kefarmasian:

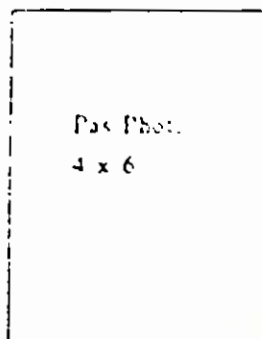
sebagai

di

Alamat

Mulai tanggal

Visum ini tidak berlaku lagi, bila yang bersangkutan tidak bekerja lagi ditempat seperti tersebut diatas.



..... 19.....

a.n. Kepala Kantor Wilayah Depkes RI

Propinsi

Kepala Bidang Bimbingan Pengendalian
Farmasi dan Makanan,

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes RI
2. Direktur Jenderal POM Depkes RI di Jakarta
3. Kepala Balai POM
4. Kepala Kandep Kes. Kab/Kodya Dati II





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 1332/MENKES/SK/X/2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR. 922/MENKES/PER/X/1993
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan apotik seperti tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 922/Menkes/SK/X/1990 tentang ketentuan dan Tata cara Pemberian Ijin Apotik sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat serta jiwa semangat Otonomi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Obat Keras (St.1937 No.541);
2. Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No.100, Tambahan Lembaran Negara No.3495);
3. Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 No.10, Tambahan Lembaran Negara No.3671);
4. Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 No.67, Tambahan Lembaran Negara No.3698);
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor. 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 378);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 72 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3848);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara RI Nomor. 40 tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3169);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.(Lembaran Negara RI Nomor. 49 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Nomor. 138 Tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, (Lembaran Negara Nomor. 54 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3952 Tahun 2000).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR. 922/MENKES/SK/X/1993 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam pasal 1, 3, 4, 7, 9, 12, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, dan 33 ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran Sediaan farmasi, Perbekalan Kesehatan lainnya kepada masyarakat.
- b. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Surat Izin Apotik atau SIA adalah Surat izin yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotik di suatu tempat tertentu.
- d. Apoteker Pengelola Apotik adalah Apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotik (SIA).
- e. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotik disamping Apoteker Pengelola Apotik dan / atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka Apotik.
- f. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker pengelola Apotik selama Apoteker Pengelola Apotik tersebut tidak berada ditempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus – menerus, telah memiliki Surat Ijin Kerja dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola Apotik di Apotik lain.
- g. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker;
- h. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan kepada Apoteker Pengelola Apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia, alat kesehatan dan kosmetika.
- j. Alat Kesehatan adalah Instrumen Aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta pemulihan kesehatan pada manusia, dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
- k. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
- l. Perlengkapan Apotik adalah semua peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan pengelolaan Apotik.
- m. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.

2. Pasal. 3

- (1) Pengelolaan Apotik di daerah-daerah tertentu dapat dinyatakan sebagai pelaksanaan Masa Bakti Apoteker bagi Apoteker yang bersangkutan;
- (2) Daerah-daerah tertentu dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Pasal 4

- (1) Izin Apotik diberikan oleh Menteri;
- (2) Menteri melimpahkan wewenang pemberian izin apotik kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota;
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin, pembekuan izin, pencairan izin, dan pencabutan izin apotik sekali setahun kepada Menteri dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi;

4. Pasal 7

- (1) Permohonan Izin Apotik diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-1;
- (2) Dengan menggunakan Formulir APT-2 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan apotik untuk melakukan kegiatan;
- (3) Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat dengan menggunakan contoh Formulir APT-3;
- (4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dilaksanakan, Apoteker Pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-4;
- (5) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3), atau pernyataan dimaksud ayat (4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan Surat Izin Apotik dengan menggunakan contoh Formulir Model APT- 5;
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM dimaksud ayat (3) masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12(dua belas) hari kerja mengeluarkan Surat Penundaan dengan menggunakan contoh Formulir Model APT.6;
- (7) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Penundaan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Pasal 9

Terhadap permohonan izin apotik yang ternyata tidak memenuhi persyaratan dimaksud pasal 5 dan atau pasal 6 , atau lokasi Apotik tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai dengan alasan-alasannya dengan mempergunakan contoh Formulir Model APT- 7.

6. Pasal 12

- (1) Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan Sediaan Farmasi yang bermutu baik dan yang keabsahannya terjamin;
- (2) Sediaan Farmasi yang karena sesuatu hal tidak dapat digunakan lagi atau dilarang digunakan, harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri .

7. Pasal 19.

- (1) Apabila Apoteker Pengelola Apotik berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka Apotik, Apoteker Pengelola Apotik harus menunjuk Apoteker pendamping;
- (2) Apabila Apoteker Pengelola Apotik dan Apoteker Pendamping karena hal-hal tertentu berhalangan melakukan tugasnya, Apoteker Pengelola Apotik menunjuk Apoteker Pengganti;
- (3) Penunjukan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota dengan tembusan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat dengan menggunakan contoh Formulir Model APT.9;
- (4) Apoteker Pedamping dan Apoteker Pengganti wajib memenuhi persyaratan dimaksud dalam Pasal 5;
- (5) Apabila Apoteker Pengelola Apotik berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun secara terus menerus, Surat Izin Apotik atas nama Apoteker bersangkutan dicabut.

8. Pasal 24

- (1) Apabila Apoteker Pengelola Apotik meninggal dunia, dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam, ahli waris Apoteker Pengelola Apotik wajib melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- (2) Apabila pada Apotik tersebut tidak terdapat Apoteker pendamping, pada pelaporan dimaksud ayat (1) wajib disertai penyerahan resep, narkotika, psikotropika, obat keras dan kunci tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Pada penyerahan dimaksud ayat (1) dan (2), dibuat Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan menggunakan contoh formulir Model APT. 11, dengan tembusan Kepala Balai POM setempat.

9. Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut surat izin apotik apabila :
- a. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan yang dimaksud pasal 5 dan atau;
 - b. Apoteker tidak memenuhi kewajiban dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 ayat (2) dan atau;
 - c. Apoteker Pengelola Apotik terkena ketentuan dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) dan atau;
 - d. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan atau;
 - e. Surat Izin Kerja Apoteker Pengelola Apotik dicabut dan atau;
 - f. Pemilik sarana Apotik terbukti terlibat dalam pelanggaran Perundang-undangan di bidang obat, dan atau;
 - g. Apotik tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebelum melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Balai POM setempat.

10. Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Pencabutan Izin Apotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf (g) dilakukan setelah dikeluarkan :
- a. Peringatan secara tertulis kepada Apoteker Pengelola Apotik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2(dua) bulan dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-12.
 - b. Pembekuan Izin Apotik untuk jangka waktu selama-lamanya 6(enam) bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan Apotik dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-13.
- (2) Pembekuan Izin Apotik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), dapat dicairkan kembali apabila Apotik telah membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan, dalam Peraturan ini dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-14.;
- (3) Pencairan Izin Apotik dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah menerima laporan pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

11. Pasal 27

Keputusan Pencabutan Surat Izin Apotik-oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-15. dan tembusan disampaikan kepada Menteri dan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat serta Kepala Balai POM setempat .

12. Pasal 29

Pengamanan dimaksud Pasal 28 wajib mengikuti tata cara sebagai berikut :

- a. Dilakukan inventarisasi terhadap seluruh persediaan narkotika, Psikotropika, obat keras tertentu dan obat lainnya serta seluruh resep yang tersedia di Apotik;
- b. Narkotika, Psikotropika dan resep harus dimasukkan dalam tempat yang tertutup dan terkunci;
- c. Apoteker Pengelola Apotik wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, tentang penghentian kegiatan disertai laporan inventarisasi yang dimaksud dalam huruf (a).

13. Pasal 30

- (1) Pembinaan terhadap apotik dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Pusat sampai dengan Daerah, atas petunjuk teknis Menteri;
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Apotik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Badan POM;
- (3) Tata cara pemeriksaan menggunakan contoh Formulir Model APT-16.

14. Pasal 31

Pelanggaran terhadap Undang-undang obat keras Nomor. St. 1937 No. 541, Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

15. Pasal 33 (2)

Apotik yang telah memiliki izin apotik berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Pemberian Izin Apotik dianggap telah memiliki izin berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dan Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 29 Oktober 2002.



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOVOR : 1332/MENKES/SK/X/2002
TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

Nomor :	Permohonan Izin Apotik
Lampiran :	
Pertanyaan :	
Kepada Yth :	
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	
di -	

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Apotik dengan data - data sebagai berikut :

1. Permohonan :
2. Nama Pemohon :
3. Nama Apotik :
4. Alamat :
5. Nomor Surat Izin Kerja / Surat Penugasan :
6. Nomor Kartu Tanda Penduduk :
7. Alamat dan Nomor telepon :
8. Pekerjaan Sekarang :
9. NPWP :
10. Dengan menggunakan sarana :
11. Nama Pemilik Sarana :
12. Alamat :
13. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

- Bersama Permohonan ini kami lampirkan :
1. Salinan / Foto copy Surat Izin Kerja Apoteker
 2. Salinan / Foto copy Kartu Tanda Penduduk
 3. Salinan / foto copy denah bangunan
 4. Surat yang mengatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak.
 5. Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama alamat, tanggal lulus dan nomor surat izin kerja
 6. Asli dan salinan / foto copy daftar terpacinai alat perlengkapan Apotik.
 7. Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotik bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotik di Apotik lain.
 8. Asli dan salinan/foto copy surat izin alasan bagi pemohon Pegawai Negeri, Anggota ABRI, dan Pegawai Instansi Pemerintah lainnya.
 9. Akte perjanjian Kerja sama Apoteker Pengelola Apotik dengan Pemilik Sarana Apotik.
 10. Surat Pernyataan Pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat.

Demikianlah permohonan kami, atas perhatian dan persetujuan bapak kami sampaikan terima kasih.

..... 20....

.....

Milik sendiri/milik pihak lain

.....
.....
.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

Nahar :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Apotik

Kepada Yth ;

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

di -

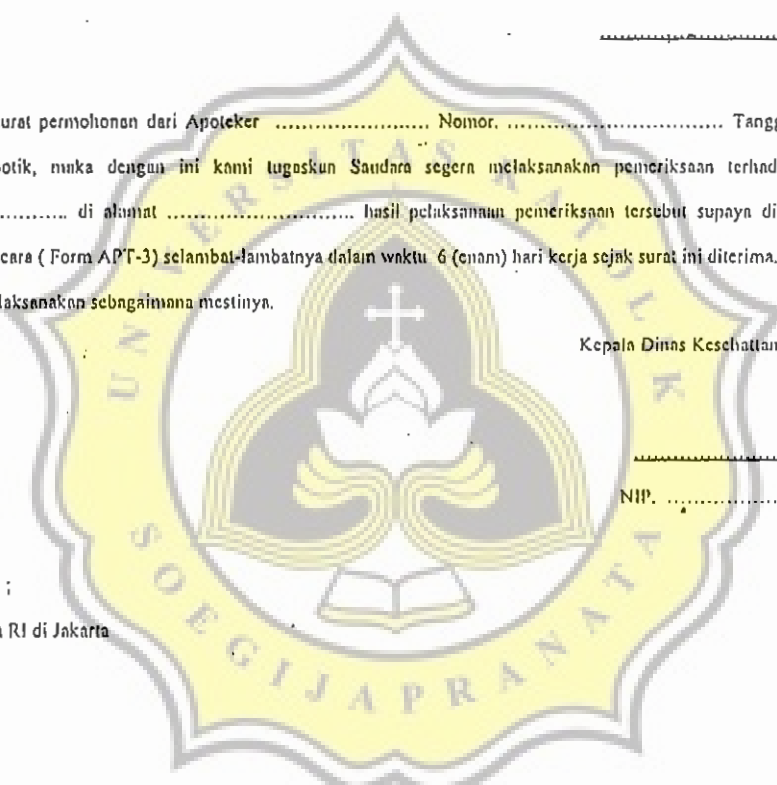
Selubungan dengan surat permohonan dari Apoteker Nomor Tanggal perihal permohonan izin Apotik, maka dengan ini kami tugaskan Saudara segera melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan Apotik di alamat hasil pelaksanaan pemeriksaan tersebut supaya disampaikan kepada kami dalam bentuk Berita Acara (Form APT-3) selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak surat ini diterima. Demikianlah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota

NIP.

Tembusan Kepada Yth ;

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Arsip.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002.
 TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMERIKSAAN APOTIK.

- BERITA ACARA PEMERIKSAAN APOTIK

Pada hari ini tanggal Bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
 Pangkat :
 Jabatan :
 N I P :

2. Nama :
 Pangkat :
 Jabatan :
 N I P :

Berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota Nomor tanggal tahun telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap :

Nama Apotik :
 A l a m a t :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kotamadya :
 Propinsi :

HASIL PEMERIKSAAN

NO	PERINCIAN	PERSYARATAN	KENYATAAN	PENILAIAN
				TMS MS
I	BANGUNAN 1. Sarana Apotik	Sarana Apotik dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan dan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi.		

	<p>2. Bangunan Apotik sekurang-kurangnya memiliki ruangan khusus untuk</p> <p>a. Ruang peracikan dan penyerahan resep.</p> <p>b. Ruangan Administrasi dan kamar kerja apoteker.</p> <p>c. W C</p> <p>3. Kelengkapan bangunan calon Apotik :</p> <p>a. Sumber air</p> <p>b. Penerangan</p> <p>c. Alat pemadam kebakaran.</p> <p>d. Ventilasi</p> <p>e. Sanitasi</p> <p>4. Papan Nama</p>	<p>- ada sesuai kebutuhan</p> <p>- ada sesuai kebutuhan</p> <p>- ada sesuai kebutuhan</p> <p>harus memenuhi persyaratan kesehatan.</p> <p>Harus cukup terang sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi apotik.</p> <p>Harus berfungsi dengan baik sekurang-kurangnya dua buah.</p> <p>Yang baik serta memenuhi persyaratan Hygiene lainnya.</p> <p>Harus baik serta memenuhi persyaratan Hygiene lainnya</p> <p>Berukuran minimal : Panjang : 60 cm Lebar : 40 cm</p> <p>Dengan tulisan : - Hitam diatas dasar putih. - Tinggi huruf minimal : 5 cm Tebal : 5 cm</p>	<p>- Sumur / PAM/ - sumur Pompa dll</p> <p>- PLN / generator</p> <p>- Petromak dll</p> <p>..... buah dengan ukuran Lb Lb</p> <p>- Jendela bh</p> <p>- Ventilasi bh</p> <p>- Saluran pembuangan limbah : ada / tidak</p> <p>- bak-bak/tempat pembuangan sampah. Ada / tidak</p> <p>Berukuran : Panjang Cm Lebar cm</p> <p>Dengan tulisan</p>	
--	---	--	---	--

II	PERLENGKAPAN :			
	1. Alat pembuatan pengolahan dan peracikan.			
	a. Timbangan milligram dengan anak timbangan yang sudah ditera.	- minimal 1 set	- ada / tidak	
	b. Timbangan Gram dengan anak timbangan yang sudah ditera	- minimal 1 set	- ada/tidak	
	c. Perlengkapan lain disesuaikan dengan kebutuhan.		- ada / tidak	
	2. Perlengkapan dan alat perbekalan Farmasi :			
	a. Lemari dan Rak untuk penyimpanan obat	- ada dengan jumlah sesuai kebutuhan	- ada/tidak buah	
	b. Lemari Pendingin	- minimal 1 buah	- ada/tidak buah	
	c. Lemari untuk penyimpanan narkotika dan psikotropika.	- ada dengan jumlah sesuai kebutuhan	- ada/tidak buah	
	3. Wadah Pengemas dan Pembungkus.			
	a. Etiket	- ada dengan jumlah sesuai kebutuhan	- ada / tidak buah	
	b. Wadah pengemas dan pembungkus untuk penyimpanan obat.	- ada dengan jumlah sesuai kebutuhan	- ada / tidak buah	
	4. Alat Administrasi :			
	a. Blanko pesanan obat	- ada dengan jumlah sesuai kebutuhan	- ada / tidak buah	
	b. Blanko Kartu stok obat	- ada dengan jumlah sesuai kebutuhan	- ada / tidak buah	
	c. Blanko salinan resep	- ada dengan jumlah sesuai kebutuhan	- ada / tidak buah	
	d. Blanko faktur dan Blanko nota penjualan.	- ada dengan jumlah sesuai kebutuhan	- ada / tidak buah	

III	e. Buku pencatatan Narkotika.	- ada dengan jumlah sesuai kebutuhan	- ada / tidak buah
	f. Buku pesanan obat Narkotika.	- ada dengan jumlah sesuai kebutuhan	- ada / tidak buah
	g. Form laporan obat Narkotika.	- ada dengan jumlah sesuai kebutuhan	- ada / tidak buah
	5.1. Buku Standar yang diwajibkan.	Farmakope Indonesia Edisi terbaru 1 buah	- ada / tidak
	2. Kumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dgn Apotik.	- ada dengan jumlah sesuai kebutuhan.	- ada / tidak
	TENAGA KESEHATAN.		
	1. Apoteker Pengelola Apotik	- Ada orang
	2. Apoteker Pendamping	 orang
	3. Asisten Apoteker.	 orang

Demikianlah Berita Acara kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab Berita Acara dibuat dalam rangkap 3(tiga) dan dikirim kepada :

1. Kepada Dinas Kesehatan Propinsi
2. Pemohon satu rangkap
3. Satu rangkap arsip

Mengetahui Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

..... yang membuat berita acara ini,

.....
NIP.

.....
NIP.

2.
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI.

NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002.

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Pernyataan siap melakukan
 Kegiatan .

Kepada Yth ;

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota

di -

Menunjuk Surat Permohonan kami Nomor : tanggal dan menunjuk ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor . 1332/MENKES/SK/X/2002 Pasal 7 ayat (4) dan (5), dengan ini kami laporkan bahwa Apotik yang beralamat di Jalan Kecamatan Kabupaten telah siap untuk melaksanakan kegiatan .

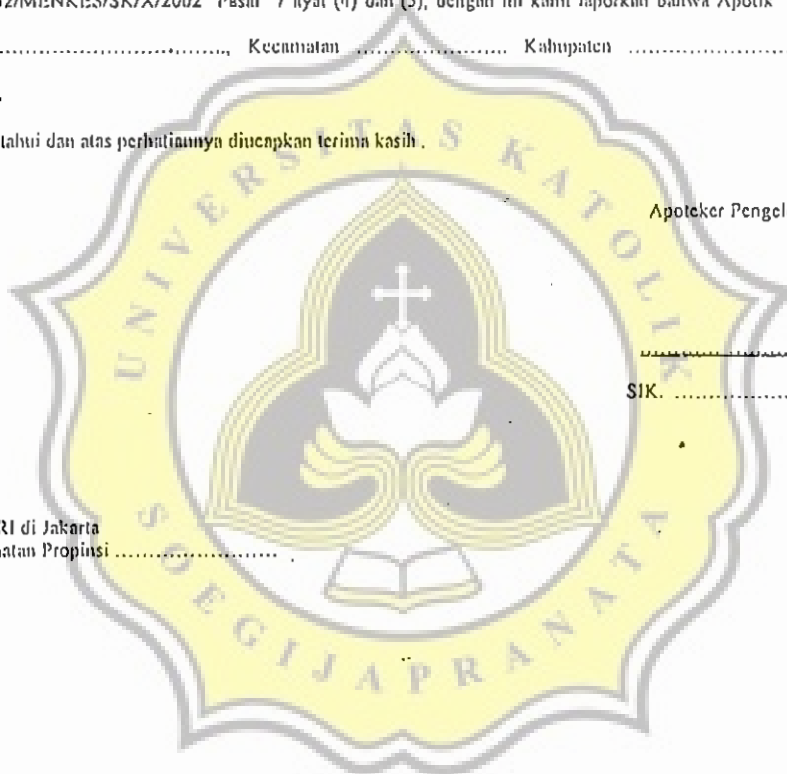
Demikianlah untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih .

Apoteker Pengelola Apotik.

SIK.

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

SURAT IZIN APOTIK

Nomor

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA.

MEMBACA : Surat Permohonan tanggal tentang permohonan untuk memperoleh izin Apotik .

MENIMBANG : bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan .

Mengingat :

1. Undang-undang Obat Keras (St. 1937 No. 541) ;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495) ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 10, Tambahan Lembaran Negara No. 3671) ;
4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 67, Tambahan Lembaran Negara No. 3698) ;
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 378) ;
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 72 tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 26 tahun 1965 tentang Apotik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor. 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3169);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Nomor. 49 tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3637) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Nomor. 138 tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3781) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, (Lembaran Negara Nomor. 54 tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3952 tahun 2000) ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian izin apotik, Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian izin Apotik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

: Memberi izin Apotik kepada :

Nama :

Alamat :

Surat Ijin Kerja Nomor : Tgl

Nama Apotik :

Alamat Apotik :

Kecamatan :

Kabupaten/Komadya :

Propinsi :

Dengan menggunakan sarana : Milik Sendiri / Milik Pihak Lain .

Nama Pemilik sarana :

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 1332/MENKES/SK/X/2002

TENTANG : KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN IZIN APOTIK

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERALIHAN TANGGUNG JAWAB
PELAYANAN KEFARMASIAN.

Pada hari ini tanggal bulan tahun Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang ketentuan dan Tata cara pemberian Izin Apotik, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

A. Apoteker Pengelola Apotik yang lama :

Nama :
 Nomor SIK :
 Alamat :
 Nama Apotik :
 Alamat Apotik :

B. Apoteker Pengelola Apotik yang Baru/Pengganti :

Nama :
 Nomor SIK :
 Alamat :

C. Dengan di saksi oleh :

Nama :
 Jabatan :
 Nomor SIK :

Telah melakukan penyerahan :

1. Resep - resep Dari tanggal sampai dengan tanggal berjumlah lembar .
2. Obat-obat narkotika sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir. Kunci-kunci lemari penyimpanan terdiri dari Buah.
3. Obat keras tertentu / Bahan Berbahaya dan obat lainnya sebagaimana daftar terlampir. Kunci-kunci lemari penyimpanan obat keras tertentu/bahan berbahaya dan obat lainnya terdiri buah .
4. Lain - lain yang dianggap perlu .

Demikianlah Berita Acara Serah terima ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab. Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan dikirimkan kepada :

1. Direktur Jenderal Yanfar dan Alkes Departemen Kesehatan RI,
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
4. Satu sebagai Arsip.

Yang Menerima,
 Apoteker Pengelola Apotik

Yang Menyerahkan,
 Apoteker Pengelola Apotik yang lama

.....
 SIK.

.....
 SIK.

Saksi - saksi :

1.

.....
 SIK.

2.

.....
 SIK.